

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
(Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam



Oleh :

FAJRUL ILMI
NIM. 093 111 1315

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN TARBIYAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2011 / 2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KELURAHAN PAHANDUT
KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : FAJRUL ILMU

NIM : 090 111 1315

JURUSAN : TARBIYAH

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Palangka Raya, 14 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd
NIP. 1956030 1198503 1 005

Pembimbing II,



Jasiah, M.Pd
NIP. 1968091 2199803 2 002

Menyetujui,

Ketua Jurusan Tarbiyah,



Drs. H. ABDUL QADIR, M.Pd
NIP. 1956020 3199003 1 001

Ketua Prodi PAI



GILIO SUPRIADI, M.Pd
NIP. 1972112 3200003 1 002

NOTA DINAS

Palangka Raya, 14 Juni 2012

Hal : Mohon Dimunqasahkan
Skripsi Saudara Fajrul Ilmi

Kepada yang terhormat,
Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
Di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : FAJRUL ILMI

NIM : 093 111 1315

JUDUL : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENIDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KELURAHAN PAHANDUT
KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam.

Demikian atas perhatiannya ddiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd
NIP. 1956030 1198503 1 005

Pembimbing II



Jasiah, M.Pd
NIP. 1968091 2199803 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)**. Oleh **Fajrul Ilmi**, NIM. 093 111 1315, telah dimunaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Sya'ban 1433 H
29 Juni 2012 M

Palangka Raya, 4 Juli 2012

Tim Penguji

1. GITO SUPRIADI, M.Pd
Ketua Sidang/ Anggota 1
2. DR. TUTUT SHOLEHAH, M.Pd
Anggota 2
3. Drs. H. AHMAD SYAR'I, M.Pd
Anggota 3
4. JASIAH, M.Pd
Sekertaris/ Anggota 4



Ketua STAIN Palangka Raya



DR. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19630118 1991031002

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
(Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)**

ABSTRAKSI

Pendidikan merupakan prioritas utama dari program pemerintah Kota Palangka Raya. Wujud dari cita-cita pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dinyatakan sudah mencapai target dengan pencapaian APK yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya).

Rumusan masalah penelitian; 1) Apakah semua anak usia 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan SD/MI. 2) Apakah semua anak berusia 13-15 tahun sedang menempuh pendidikan SMP/MTs. 3) Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 7-12 tahun. 4) Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 13-15 tahun. 5) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian; aparat Kelurahan Pahandut, ketua RW/RT Kelurahan Pahandut, peserta didik, Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) Pengurangan Data (*Data Reduction*). 2) Penyajian data (*Data Display*). 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) Anak usia sekolah 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 4308 siswa melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berjumlah 2603 atau 165,50% yang mengikuti pendidikan, tetapi masih ada 56 orang yang putus sekolah. 2) Anak usia sekolah 13-15 tahun yang sekolah berjumlah 1053 lebih sedikit daripada penduduk usia 13-15 tahun yang berjumlah 1480 atau 71,14% yang mengikuti pendidikan dan 26 orang putus sekolah. 3) APK dan APM SD/MI yang dicapai 165,50% dan 145,06% tinggi melebihi jumlah penduduk usia SD/MI. 4) APK dan APM SMP/MTs yang dicapai hanya 71,14% dan 62,97% lebih sedikit dari jumlah penduduk usia SMP/MTs. 5) Kendala yang dihadapi, yaitu Kurang dana dan sering terlambat, guru yang berpendidikan SMA/ sederajat dan mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, banyak pendatang usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah, dan kurang baiknya kerja-sama antara kepala sekolah dengan pengawas. upaya untuk mengatasi kendala, yaitu pengadaan kuliah percepatan dan memberikan bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan, Memperbaiki kerja sama antara pihak sekolah dengan pegawai, membuka paket A dan B untuk memberi kesempatan kepada anak yang putus sekolah.

**THE EVALUATION OF NINE YEARS BASIC EDUCATION LEARNING
OBLIGATED PROGRAM IMPLEMENTATION
(Case Study at Pahandut Sub District of Pahandut District of Palangka Raya)**

ABSTRACT

Education is the main priority of Palangka Raya government's program. The implementation of the visions of Palangka Raya government is to implement the nine years basic education learning obligated program. The program has achieved the target of quite high *APK* achievement. Based on the case, the writer is interested in conducting the study about the evaluation of nine years basic education learning obligated program implementation (Case Study at Pahandut Sub District of Pahandut District of Palangka Raya).

The formulations of the problem are 1) Do all the children of 7-12 years old study at *SD/MI*? 2) Do all children of 13-15 years old study at *SMP/MTs*? 3) Is the number of rough and pure participation suitable with the number of 7-12 years old children? 4) is the number of rough and pure participation suitable with the number of 13-15 years old children? 5) What are the barriers faced by the government in implementing the program?

The study is descriptive study with qualitative approach. The subjects of the study are the officials of Pahandut Sub District, the head of *RW/RT* of Pahandut Sub District, the students, the Ministry of Religious Affairs of Palangka Raya, the Education, Youth, and Sport Institution, and society. The data are collected by observation, interview, and documentation techniques. The data validation applies triangulation. The data analysis consists of three steps of data reduction, data display, conclusion drawing/verifying.

The result of the study showed that: 1) The 7-12 years old children who studied at school were 4308 students over the number of the citizens of 7-12 years old who were 2603 in number or 165,50% who were in school, but there were still 56 retiring students. 2) The 13-15 years old children who studied at school were 1053 students or lesser than the citizens of 13-15 years old children who were 1480 in number or 71,14% who were in school and there were 26 retiring students. 3) *APK* and *APM* of *SD/MI* achieved was 165,50% and 145,06% higher over the citizen number of *SD/MI* aged. 4) *APK* and *APM* of *SMP/MTs* achieved was 71,14% and 62,97% lesser than the citizen number of *SMP/MTs* aged. 5) The barriers faced were the lacking and lateness of fund, the *SMA/MA* educated teachers taught differently with the skill, the school aged new comers who were not in school, and the lacking of cooperation between the principal and the supervisor. The efforts of solving the barriers were carrying out the acceleration lecture and giving the school side and supervisor, and conducting *A* and *B* packages for the retiring school students.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang izin dan ridho-Nya, doa dan usaha akhirnya skripsi yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)”** dapat penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu usaha dalam rangka menyumbangkan pemikiran sekecil apapun nilainya bagi dunia pendidikan terutama pendidikan islam.

Penulisan skripsi dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Ketua STAIN Palangka Raya periode 2008-2012 yang telah memberikan izin kepada penulis menyelesaikan kuliah pada jenjang strata 1.
2. Ketua Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, yang selalu menyediakan waktu untuk keperluan penulis saat konsultasi mata kuliah maupun skripsi.
3. Bapak Drs. H. Ahmad Syar'I, M.Pd, dan Ibu Jasiah, M.Pd, selaku pembimbing , selaku pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu dan pemikiran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan karyawan, terkhusus karyawan perpustakaan yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis ketika memerlukan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Kepada kedua orang tua yang selalu membantu baik dari pemikiran maupun segi material.
6. Kawan, sahabat dan seluruh orang yang turut memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada Allah penulis memohon dan berharap semoga karya ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis juga bagi kaum muslimin. Amin.

Palangka Raya, 4 Juli 2012

Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan buat:

1. Ibu (Hj. Fatimah) dan Bapak (Prof. DR. H. Mahyuddin Barnie, M.Ag)
tersayang yang selalu menyokong dan mendukung saya tanpa hentinya.
2. Ibu Mertua (Hj. Fatimah) dan Bapak mertua (H. Saipuddin) tersayang
yang selalu memberikan dukungan
3. Bapak dan Ibu Guru juga Dosen yang telah mengajari dan
membimbingku.
4. Yang tercinta Isteriku (Fitriani) dan Anakku (Nayla Aathifah Ilmi)
5. Adik-adik serta segenap keluargaku tersayang
6. Almamater dimana penulis menimba ilmu;
7. Segenap sahabat dan saudara-saudariku seiman dan seakidah.

MOTTO

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Mencari ilmu adalah fardhu (wajib) bagi setiap orang islam”. (HR. Ibnu Majah)*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya), adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 4 Juli 2012

Yang membuat pernyataan


AJRUL ILMI
NIM. 093 111 1315

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ix |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO..... | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penelitian Sebelumnya..... | 8 |
| B. Deskripsi Teoritik..... | 9 |
| 1. Evaluasi Program..... | 9 |
| 2. Tujuan Evaluasi Program..... | 10 |
| 3. Model Evaluasi Program..... | 10 |
| 4. Pengertian Belajar..... | 13 |
| 5. Pentingnya Belajar..... | 14 |
| 6. Hak Warga Negara Mengikuti Pendidikan..... | 15 |
| 7. Program Wajib Belajar..... | 16 |

| | |
|--|----|
| 8. Tujuan dan Fungsi Wajib Belajar..... | 17 |
| 9. Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar..... | 19 |
| 10. Jenjang Pendidikan Dasar..... | 20 |
| 11. Angka Partisipasi..... | 22 |
| C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian..... | 25 |
| 1. Kerangka Pikir..... | 25 |
| 2. Pertanyaan Penelitian..... | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 29 |
| B. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian..... | 29 |
| C. Sumber data dan Jenis data..... | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Pengabsahan Data..... | 35 |
| F. Analisis Data..... | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 37 |
| B. Penyajian Data dan Analisis Data..... | 43 |
| C. Pembahasan..... | 64 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 39 |
| TABEL 2. PEKERJAAN PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 40 |
| TABEL 3. PRASARANA PENDIDIKAN TAHUN 2010/2011..... | 42 |
| TABEL 4. PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 43 |
| TABEL 5. ANAK USIA 7-12 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN SD/MI dan PONDOK PESANTREN TINGKAT ULA DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 45 |
| TABEL 6. ANAK DI BAWAH 7 TAHUN DAN DI ATAS 12 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN SD/MI DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 47 |
| TABEL 7. ANAK USIA 13-15 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN MTs dan PONDOK PESANTREN TINGKAT WUSTHO DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 50 |
| TABEL 8. ANAK USIA 13-15 TAHUN YANG MENGIKUTI PAKET B DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 51 |
| TABEL 9. ANAK USIA DI BAWAH 13 DAN DI ATAS 15 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN MTs DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011..... | 52 |
| TABEL 10. ANAK PUTUS SEKOLAH SD/MI dan SMP/MTs DI KELURAHAN PAHANDUT..... | 59 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam kemuka bumi dengan salah satu misinya membebaskan manusia dari kebodohan sekaligus mencerdaskannya, banyak ayat Al-Quran yang mengajak kepada umat manusia/umat islam untuk belajar, mengikuti pendidikan dan membaca seperti surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٤﴾

Artinya : 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.¹ (Qs. Al-Alaq: 1-5)

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa manusia disuruh membaca atau belajar, karena manusia tidak akan dapat mengetahui apapun sebelum dia belajar (memperoleh pendidikan). Hal ini diperkuat pula oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجه)

¹Departemen Agama RI, Al-Quran Surah Al-Alaq (96) Juz 30, hal. 1079

Artinya : *Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Mencari ilmu adalah fardhu (wajib) bagi setiap orang islam”. (HR. Ibnu Majah)*²

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang meliputi semua lapisan masyarakat Indonesia, baik masyarakat yang berstatus sosial tinggi maupun masyarakat berstatus sosial rendah. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban semua warga Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³

Berdasarkan pasal 31 ayat 1 dan 2 tersebut diatas, maka setiap masyarakat Indonesia berhak bahkan wajib mengikuti pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dilaksanakan secara merata di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik perkotaan maupun di pedesaan, dengan harapan program wajib belajar tersebut dapat mengikis sedikit demi sedikit dan menghilangkan keterbelakangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama ini terutama bagi masyarakat di kalangan rendah.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1, 2 dan 3, yakni:

² Muhammmad Nashiruddin AL-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 122

³ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2, Surakarta: Putra Mandiri, hal. 23

1. Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁴

Masyarakat sebagai mitra pemerintah harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan ilmu pengetahuan teknologi dan perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini dan masa yang akan datang.

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah berusaha mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan memberlakukan wajib belajar bagi masyarakat kota Palangka Raya. Ini dapat dilihat dalam Visi Kota Palangka Raya yaitu Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan. Sedangkan misinya yaitu Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi nasional dan global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Pendidikan merupakan prioritas utama dari program pemerintah kota Palangka Raya karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan pembangunan di kota ini. Salah satu wujud dari cita-cita tersebut pemerintah kota Palangka Raya melaksanakan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

⁴ Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003, pasal 34. Hal.253

⁵ BAPPEDA dan BPS, *Kota palangka raya dalam angka (palangka raya city in figures)*, 2009, hal. xlvii

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dilaksanakan dinyatakan sudah mencapai target. Oleh karena itu Pemerintah kota Palangka Raya meluncurkan program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun sebagai kelanjutan dari program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. dimana program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menurut pemerintah telah memenuhi target dengan pencapaian APK untuk SD/MI 125,9% dan APK untuk SMP/MTs 139,97 dan menempatkan Kota Palangka Raya sebagai kota paling tinggi mengungguli Kota Nangroe Aceh Darussalam dengan APK 138,05% sebagai peringkat kedua di bawah Kota Palangka Raya.⁶

Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 km² dan berpenduduk sebanyak 200.998 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 75 jiwa tiap km² (sensus penduduk 2009). Secara administratif Kota Palangka Raya terdiri dari lima kecamatan yakni : Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit.⁷

Kecamatan Pahandut adalah kecamatan tertua di Kota Palangka Raya. Nama Pahandut pernah dijadikan oleh Presiden RI Soekarno sebagai nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum diubah menjadi Palangka Raya. Kecamatan Pahandut ini adalah daerah yang paling padat penduduknya di Kalimantan Tengah. Dalam hal pendidikan kecamatan, Pahandut termasuk yang mempunyai tingkat satuan pendidikan terbanyak dengan jumlah 85 unit karena kecamatan Pahandut tidak jauh dari pusat kota.

⁶ HM. Riban Satia, *Detak Kota*, edisi 31 Mei-6 juni 2010, hal. 6

⁷ BAPPEDA dan BPS, *Kota palangka raya dalam angka (palangka raya city in figures)*, 2009, hal. 59

Kecamatan Pahandut memiliki beberapa kelurahan yang salah satunya adalah kelurahan Pahandut dengan luas wilayah 9,50 km² dan berpenduduk sebanyak 23.412 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.464,42 jiwa tiap km².⁸

Kelurahan Pahandut adalah salah satu wilayah yang berada di wilayah Kota Palangka Raya Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 3965 H, termasuk Kelurahan Pahandut Seberang.

Untuk mengetahui sejauh mana ketuntasan dan pemerataan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Palangka Raya penulis mengadakan penelitian masalah yang terkait dengan kesimpulan pemerintah bahwa wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah selesai, dengan judul: **“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)”**.

B. Rumusan masalah

Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah semua anak usia 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut.
2. Apakah semua anak berusia 13-15 tahun sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.

⁸ BAPPEDA dan BPS, *Kota palangka raya dalam angka (palangka raya city in figures)*, 2009, hal. 57

3. Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut
4. Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut
5. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh Pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan anak usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.
3. Untuk mendeskripsikan angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang diharuskan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kelurahan Pahandut.
4. Untuk mendeskripsikan angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 13-15 tahun yang diharuskan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.
5. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pendidik tentang pentingnya pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Pahandut
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib belajar sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program wajib belajar.
4. Sebagai upaya pengembangan wawasan berfikir, menambah pengetahuan dan melatih daya analisis dalam melihat suatu masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang mengangkat tentang wajib belajar pendidikan dasar sebelumnya telah dilakukan oleh Nelly Fathonah dengan judul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada masyarakat di Daerah pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa:

Pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar di pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengadakan program antara lain pembangunan kelas baru, peningkatan guru bantu, honor maupun PNS dan pengadaan buku paket. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang menghambat program tersebut yaitu: ekonomi masyarakat pesisir yang masih lemah, minimnya sarana transportasi, sarana-prasarana pendidikan masih kurang, serta tingkat kepedulian masyarakat yang rendah. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar adalah dengan mengadakan perluasan kegiatan pendidikan luar sekolah yaitu membuka program kejar paket A, B, dan C. Masyarakat pesisir sebagian sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.⁹

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi Kasus di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik subjek maupun objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kota dan kelurahan yang diteliti. Adapun objek yang

⁹Nelly Fathonah, skripsi, Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada masyarakat di daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, 2009, STAIN Palangka Raya.

diteliti yaitu: anak usia 7-15 tahun, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, dan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

B. Deskripsi Teoritik

1. Evaluasi Program

Berbagai kebijakan dan program pendidikan ditawarkan oleh pemerintah. Di samping itu masyarakat juga semakin kritis untuk menilai keberhasilan, mutu dan keberhargaan suatu kebijakan atau program pendidikan. Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan, manfaat dan mutu pendidikan dengan melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian dipergunakan untuk memperbaiki program ataupun sistem pendidikan yang ada.

Robert E Stake mengemukakan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk merespon suatu program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.¹⁰ Adapun menurut Suharsimi Arikonto, evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.¹¹ Sedang Mugiadi menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan atau proyek.¹²

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan di atas maka evaluasi program dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk

¹⁰ Djuju sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 21

¹¹ Suharsimi Arikonto, *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 297

¹² Djuju sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar sekolah*, hal. 21

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang direncanakan.

2. Tujuan evaluasi program

Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai atau terpenuhi ketika ingin melakukan suatu kegiatan. “Tujuan adalah unsur paling penting dalam evaluasi program. Tujuan evaluasi berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan evaluasi program”.¹³

Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Pada pelaksanaannya evaluasi program bermaksud mencari informasi atau data sebanyak mungkin untuk mendapatkan gambaran rancangan dan pelaksanaan program. Hasil Evaluasi tersebut akan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

3. Model Evaluasi Program

Model evaluasi menurut Tayibnapis adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya.¹⁴

¹³ Djuju sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar sekolah*, hal. 35

¹⁴ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi program*, Jakarta: Rhineka cipta, 1989, hal. 13

Model evaluasi dapat dibedakan menurut jenis pertanyaannya, tujuannya, pendekatannya, dan prosedur yang ditempuh. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak ada model yang paling baik. Model yang digunakan tergantung kepada untuk apa, di mana, dan kapan evaluasi tersebut akan digunakan.¹⁵

Adapun model-model evaluasi program antara lain:

- a. **“Goal Oriented Evaluation Model (Tyler).** Dalam model ini, yang menjadi objek pengamatan adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai.”¹⁶
- b. **Goal Free Evaluation Model (Michael Scriven),** Dalam model ini, evaluator sengaja menghindari untuk mengetahui tujuan program, berfokus pada hasil yang sebenarnya bukan hasil yang direncanakan, hubungan evaluator dengan peserta dibuat seminimal mungkin, dan tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi.¹⁷
- c. **CIPP Model,** CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata *Context, Input, Product, dan Output*. Stufflebeam membagi evaluasi menjadi empat, yaitu: *context evaluation to serve planning decision*, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai. *Input evaluation structing decision*, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan

¹⁵ Purwanto dan Suparman, *Evaluasi Program Diklat*, Jakarta : STAI-LAN, 1997, hal. 14

¹⁶ Djuju sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar sekolah*, hal. 25

¹⁷ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal. 31

sumber-sumber yang ada, alternative yang diambil. *Proses evaluation to serve implementing decision*, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. *Product evaluation to serve recycling decision*, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya.¹⁸

d. **Model UCLA, Alkin mengemukakan** lima macam evaluasi, yakni:

- 1) *System assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan.
- 4) *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan. Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga.
- 5) *Program certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program.¹⁹

e. **Model Formatif vs Sumatif.** Menurut Scriven evaluasi terhadap program dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan

¹⁸ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rhineka cipta, 2008, hal. 14

¹⁹ *Ibid*, hal. 15

pada waktu pengembangan atau perbaikan program atau produk. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan saat program telah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil keputusan.²⁰

4. Pengertian Belajar

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok di sekolah, karena tercapai atau tidak tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik.

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.²² Belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap.²³

Menurut Howard L. Kingsey dalam buku Saiful Bahri Djamarah *Psikologi Belajar*: “*learning is the process by which behavior (in the broader sense) is originated or changed through practice or training.*”

²⁰ Seels dan Richey, *Teknologi Pembelajaran*, Jakarta: Unit Percetakan UNJ, 1994, hal.63

²¹ Slameto, *Proses belajar mengajar dalam system kredit semester SKS*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 78

²² Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 2

²³ Margaret E. Bell Gredler, *Belajar dan Membelajarkan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 1

Belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan”.²⁴

Dari pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diambil suatu pemahaman tentang belajar. Belajar adalah proses perubahan secara menyeluruh terhadap tingkah laku melalui praktek atau latihan serta proses memperoleh berbagai kecakapan dan keterampilan.

5. Pentingnya Belajar

Era Globalisasi merupakan era yang penuh dengan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan, untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan pendidikan yang bermutu. Peningkatan mutu pendidikan bisa dimulai dari yang paling dasar yaitu pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SLTP/Mts. Pendidikan dasar ini akan menjadi pondasi untuk menunjang keberhasilan pendidikan jenjang yang lebih tingginya yaitu di sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Melalui belajar manusia dapat mengaktualisasikan diri dan lingkungannya sehingga kualitas hidup dan kehidupannya menjadi makin lebih baik.

Saiful Bahri menyatakan bahwa:

Orang-orang yang besar dengan kedudukan dan menempati posisi yang penting dalam kehidupan social di masyarakat bermula dari kegiatan mereka yang tekun belajar menuntut ilmu. Berkat ilmu yang mereka kuasai, orang lain pun akhirnya menghargai keahlian mereka dengan memberikan kedudukan dan peranan yang penting. Mereka itu adalah orang-orang pintar karena belajar.²⁵

²⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 13

²⁵ Saiful Bahri Djamarah, *Rahasia sukses belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 3

Hal senada diungkapkan Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono bahwa “Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak didik”.²⁶

6. Hak warga Negara mengikuti pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak yang paling penting dan yang semestinya paling utama didapatkan oleh setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu:

- 1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.²⁷

Selain pemerintah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan dalam Undang-Undang no.20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dan 5 telah dirumuskan hak pendidikan warga Negara sebagai berikut:

- 1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 5) Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat²⁸

Kansil mengemukakan bahwa:

Hak mendapatkan pengajaran sesuai dengan tujuan Negara yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan

²⁶ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 125

²⁷ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1, hal. 23

²⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pasal 5, hal. 242

kehidupan bangsa, maka pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan²⁹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, baik masyarakat yang berstatus sosial tinggi maupun masyarakat berstatus sosial rendah.

7. Program Wajib Belajar

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara indonesia untuk mengecap bangku pendidikan.

Dalam bunga rampai kebijakan teknis pembinaan usaha kewajiban belajar dikemukakan bahwa:

Wajib belajar adalah kewajiban bagi pemerintah bagi bersama orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar bagi anak usia 7-15 tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kewajiban bagi anak tersebut untuk memfaatkannya dalam usaha untuk memperoleh hak dan pengajarannya.³⁰

Kemudian usman menyatakan bahwa “pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lama 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP atau satuan pendidikan yang sederajat”.³¹

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kedua pasal 17 dinyatakan bahwa:

²⁹Christine S. T Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa ini*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 31

³⁰Depdikbud, *Bunga Rampai Kebijakan Teknik Pembinaan Kewajiban Belajar*, Jakarta: Dirjen pendidikan dasar, 1994, hal. 47

³¹Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 143

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.³²

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi anak usia sekolah yang lamanya 9 tahun, 6 tahun di SD/MI dan 3 tahun di SMP/MTs.

8. Tujuan dan Fungsi Program Wajib Belajar

Usman menyatakan bahwa "Bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah".³³

Hal senada diungkapkan Umar bahwa:

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar, di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.³⁴

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Fungsi dan Tujuan, pasal 2 dijelaskan bahwa:

³² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, pasal 17, hal. 245

³³ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hal. 144

³⁴ Umar Tirtaraharja I. Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 265

- 1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Indonesia.
- 2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.³⁵

Di samping itu juga wajib belajar 9 tahun diselenggarakan dengan sebaik-baiknya agar terwujud pemerataan pendidikan dasar yang bermutu.

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan bermacam-macam kondisi, ekonomi, budaya, dan geografis yang memerlukan pemikiran dan perencanaan yang matang dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Program wajib belajar 9 tahun dilakukan untuk merespon berbagai masalah dan tantangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih cukup tinggi, termasuk anak putus sekolah yang tidak melanjutkan lagi
- 2) Angka mengulang yang cukup tinggi
- 3) Mutu pendidikan yang masih rendah.

Wajib belajar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar "baca-tulis", pengetahuan dan

³⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2008, Jakarta: Bp. Ciptajaya, 2009.

keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan di SMP.

Wajib belajar 9 tahun diselenggarakan di sekolah menengah pertama bertujuan memberikan bekal kemampuan yang merupakan perluasan dan peningkatan kemampuan dasar yang telah di peroleh selama di sekolah dasar. yang nantinya bermanfaat bagi siswa mengembangkan kehidupannya, sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan menengah.

9. Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar

Dalam pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya, antara lain:

- a. Pendekatan Budaya, sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut.
- b. Pendekatan Sosial, sosialisasi wajib belajar yang bermutu perlu memperhatikan kondisi social ekonomi masyarakat. Bila masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi.
- c. Pendekatan Agama, pada daerah tertentu ada masyarakat yang agamis dan sangat menaati ayat-ayat suci. Untuk daerah ini perlu peran tokoh sangat sesuai.
- d. Pendekatan birokrasi, upaya memanfaatkan sistem pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- e. Pendekatan Hukum, pendekatan yang hanya digunakan pada daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan resistensinya tinggi.³⁶

10. Jenjang Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan dasar yang pertama ditempuh oleh anak adalah di sekolah dasar kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah pertama. Selain kedua sekolah tersebut pendidikan dasar juga bisa ditempuh melalui lembaga pendidikan yang lain yang berbasiskan Islam, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Tsanawiyah dalam hal kesetaraan keduanya sama saja dengan lembaga pendidikan SD dan SMP.

a. Sekolah Dasar

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun yang dimulai dengan kelas 1 dan berakhir dikelas 6. Pada umumnya anak dimasukkan ke sekolah dasar pada kisaran umur 7 tahun.

Pendidikan dasar memiliki tujuan yang diharapkan dapat membantu siswa untuk melanjutkan ketingkat selanjutnya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan siswa, yaitu kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung.

b. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama merupakan jenjang lanjutan dari sekolah dasar pada pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama ini

³⁶<http://komposiana.com/post/edukasi/2011/02/12/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun/>

ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun yang dimulai dari kelas 9 sampai kelas 12.

Pendidikan ini memiliki tujuan sebagai bekal kemampuan dasar bagi siswa yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya di sekolah dasar. Untuk mengembangkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara serta pribadi sosial serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan dan mengikuti jenjang pendidikan menengah atau hidup bermasyarakat nantinya.

Jenjang pendidikan pada lembaga pendidikan madrasah, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah yang sejajar dengan Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah yang sejajar dengan Sekolah Menengah Pertama.

c. Madrasah Ibtidaiyah

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah hampir sama dengan tujuan pendidikan dasar lembaga Sekolah Dasar yang memiliki tujuan diharapkan dapat membantu siswa untuk melanjutkan ketingkat selanjutnya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan siswa, yaitu kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung. Akan tetapi dalam madrasah ibtidaiyah ini ditambahkan menanamkan tentang keagamaan pada diri anak untuk bekal hidupnya nanti.

d. Madrasah Tsanawiyah

Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan berciri khas keislaman

pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

Tujuan Madrasah Tsanawiyah pun tidak jauh beda dengan tujuan Sekolah Menengah Pertama untuk mengembangkan pendidikan yang telah diperoleh pada tingkat dasar dan perluasan keterampilan yang telah diperoleh. Akan tetapi pada madrasah tsanawiyah ini pemahaman anak tentang keagamaan lebih diperdalam sedikit untuk menguatkan keimanan anak terhadap islam.

11. Angka Partisipasi

Dalam pelaksanaan program wajib belajar dikenal angka partisipasi, dengan angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah program tersebut disukai oleh masyarakat atau tidak. Semakin besar angka partisipasi pada suatu program berarti program tersebut berkualitas, begitu pula sebaliknya jika angka partisipasi kurang dan peserta banyak berhenti pada saat proses pelaksanaan berarti program tersebut tidak berkualitas.

Angka partisipasi adalah perbandingan antara jumlah murid dan jumlah penduduk usia belajar. Penduduk usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah anak umur 7 sampai dengan 15 tahun.³⁷ Adapun angka partisipasi tersebut, yaitu:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan kelompok

³⁷Nurberlian, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.17 No.1 Januari 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional hal. 45

penduduk yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.³⁸ Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah anak yang bersekolah pada jenjang yang ditentukan pada wilayah tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung APK, yaitu:

$$APK = \frac{\text{Jumlah siswa SD atau SMP seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12/13-15}} \times 100$$

Contoh:

- a. Jumlah murid SD/MI tahun 2008 adalah 14.000 orang
- b. Jumlah anak umur 7-12 tahun adalah 23.000 orang

$$APK = \frac{14.000 \text{ orang}}{23.000 \text{ orang}} \times 100 = 60,87 \%$$

- b. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.³⁹ APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.⁴⁰ Rumus yang digunakan untuk menghitung APM, yaitu:

³⁸ Ida Kintamani, *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, Vol.15 edisi khusus I agustus 2009, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional, hal.182.

³⁹ *Ibid*, hal.181

⁴⁰ <http://www.ekoguntoro.wordpress.com/2009/04/24/apk-dan-apm/>

$$APM = \frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12/13-15}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12/13-15}} \times 100$$

Contoh:

- a. Murid SD/MI usia 7-12 tahun adalah 12.600 orang
- b. Penduduk usia 7-12 tahun 2008 adalah 23.000 orang

$$APM = \frac{12.600 \text{ orang}}{23.000 \text{ orang}} \times 100 = 54,78 \%$$

- c. Angka Partisipasi sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah disemua jenjang pendidikan. Rumus yang digunakan untuk menghitung APS, yaitu:

$$APS = \frac{N1}{N2} \times 100$$

Dimana :

- N1 = Jumlah murid berbagai jenjang pendidikan pada kelompok usia sekolah tertentu.
- N2 = Jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai.⁴¹

Contoh:

- a. Murid SD/MI usia 7-12 ditambah murid SMP/Mts usia < 13 tahun adalah 12.600 ditambah 1.400 orang

⁴¹ <http://www.wakhinuddin.wordpress.com/2009/08/07/angka-partisipasi-dalam-pendidikan/>

b. Anak usia 7-12 tahun 2008 adalah 23.00 orang

$$APS = \frac{2.600+1.400 \text{ orang}}{23.000 \text{ orang}} \times 100 = 60,87$$

Untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendidikan digunakan indicator pemerataan. Indicator adalah angka menunjukkan tingkat pemerataan. Indicator sering dipakai untuk menganalisa pemerataan memperoleh layanan pendidikan adalah angka partisipasi.

C. Kerangka pikir dan pertanyaan penelitian

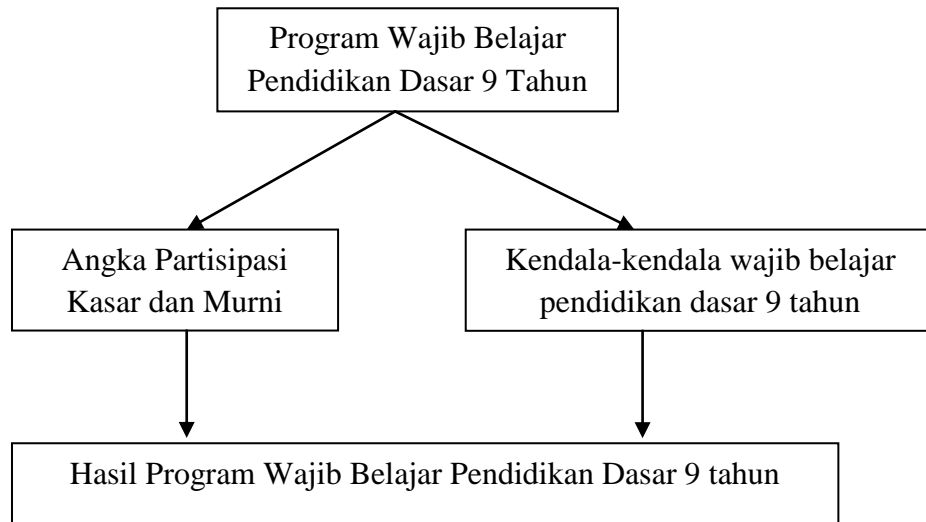
1. Kerangka Pikir

Secara garis besar yang dimaksud wajib belajar pendidikan dasar adalah kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah bersama orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana anak usia sekolah yang lamanya 9 tahun, yaitu: 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintah melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mengusahakan supaya anak-anak usia sekolah pendidikan dasar 7-15 tahun sedang dan telah mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Pemerintah telah menyatakan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan pencapaian APK yang cukup tinggi. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah semua anak usia 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - 1) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah
 - 2) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah
- b. Apakah semua anak usia 13-15 tahun sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - 1) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah
 - 2) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah
- c. Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut
 - 1) Jumlah angka partisipasi kasar SD/MI

- 2) Jumlah angka partisipasi murni SD/MI
- 3) Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut
- d. Bagaimana angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut
 - 1) Jumlah angka partisipasi kasar SMP/Mts
 - 2) Jumlah angka partisipasi murni SMP/Mts
 - 3) Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut
- e. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut baik orangtua maupun pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember sampai 10 Maret 2012 guna pendumpulan data yang valid dan sesuai dengan fenomena yang terjadi.

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Pahandut yang merupakan kelurahan yang penduduknya cukup padat dari pada kelurahan lain di Kecamatan Pahandut dan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan tertua di kota Palangka Raya yaitu Kecamatan Pahandut.

B. Pendekatan, Subjek, dan Objek Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu.⁴²

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 54-55

Menurut Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian* mengatakan bahwa “penelitian kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”⁴³

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparat Kelurahan Pahandut, ketua RW dan RT Kelurahan Pahandut, serta peserta didik pendidikan tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga menggali data dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya, serta masyarakat yang berkepentingan dan terkait langsung dalam program ini sebagai informan pendukung.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah evaluasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (dari segi evaluasi hasil pelaksanaan) di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

C. Sumber data dan jenis data

1. Sumber data

Sumber data yang dimaksud di sini adalah dari mana data penelitian ini diperoleh dan didapatkan, yaitu melalui informasi aparat kelurahan Pahandut, ketua RW dan RT kelurahan Pahandut, peserta didik usia 7-12

⁴³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2001, hal.3

tahun dan 13-15 tahun, serta data-data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

2. Jenis data

Jenis data yang dimaksud adalah:

- a. Data tertulis, yaitu informasi yang didapatkan dari tulisan, arsip, dokumentasi, laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data tidak tertulis, yaitu semua keterangan yang tidak tertulis didapatkan dari observasi dan wawancara yang dilakukan.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk mengungkapkan tujuan penelitian.

1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas tentang objek yang sedang diteliti. Dalam pengembangannya observasi ialah “pengamatan, peninjauan secara cermat”.⁴⁴ Observasi juga dilakukan bila banyak keterangan tentang masalah yang sedang diselidiki, observasi diperlukan untuk meyakinkannya. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah dan petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 695

Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁵ Jadi, observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala peristiwa serta masalah-masalah yang diteliti.

Melalui tahap observasi ini penulis ingin menggali data tentang:

- a. Gambaran umum Lokasi Penelitian
- b. Kondisi/ keadaan sosial masyarakat di Kelurahan Pahandut
- c. Prasarana pendidikan di Kelurahan Pahandut

2. Teknik wawancara

Moleong menyatakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶

Disamping itu Sugiono menyatakan “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu”.⁴⁷

Adapun data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan lisan melalui bercakap-cakap, bertatap muka dengan orang yang memberikan informasi, wawancara ini untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, meliputi:

⁴⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian social dan pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 173

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 186

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2005, hal.72

- a. Anak berusia 7-12 tahun sedang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.
 - 1) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh Pendidikan SD/MI.
 - 2) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah.
- b. Anak berusia 13-15 tahun sedang menempuh program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut.
 - 1) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs.
 - 2) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah.
- c. Angka partisipasi kasar dan murni SD/MI dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.
 - 1) Membandingkan angka partisipasi kasar dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.
 - 2) Membandingkan angka partisipasi murni dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.
- d. Angka partisipasi kasar dan murni SMP/Mts dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut
 - 1) Membandingkan angka partisipasi kasar dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut.
 - 2) Membandingkan angka partisipasi murni dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut.

- e. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut baik orang tua maupun pemerintah.

3. Teknik dokumentasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau penumpukan bukti-bukti dan keterangan.⁴⁸

Lebih lanjut sugiono menyatakan bahwa ”dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang”.⁴⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah catatan penting dari suatu peristiwa-peristiwa seseorang yang digunakan sebagai bukti keterangan. Sedang dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan informasi di bidang pengetahuan dan pemberian atas pengumpulan bukti-bukti dan keterangan.

Adapun data yang diambil dari teknik ini adalah:

- a. Sejarah singkat Kelurahan Pahandut
- b. Data jumlah penduduk usia 7-12 tahun
- c. Data jumlah siswa SD/MI di Kelurahan Pahandut
- d. Data jumlah penduduk usia 13-15 tahun
- e. Data jumlah siswa SMP/MTs di Kelurahan Pahandut
- f. Angka partisipasi kasar SD/MI

⁴⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.240

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal.82

- g. Angka partisipasi kasar SMP/Mts
- h. Angka partisipasi murni SD/MI
- i. Angka partisipasi murni SMP/MTs

E. Pengabsahan data

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan teliti oleh penulis sesuai atau relevan dengan apa yang terjadi sesungguhnya benar-benar terjadi dalam kenyataan sebenarnya. Hal ini penulis lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang telah dihimpun dan dikumpulkan oleh penulis itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti.

Moleong mengemukakan bahwa "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".⁵⁰

Menurut sugiyono "triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada".⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kuantitatif.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 330

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 83

Adapun cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang absah dengan triangulasi adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data akan diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Adapun tahap analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis menurut pendapat Milles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi mengemukakan bahwa teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian, karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari kancan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutupi kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa

adanya khusus tentang peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu dilakukan dengan melihat kembali redaksi data (pengurangan data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisa. Ini dilakukan agar hasil penelitian secara kongkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.⁵²

Analisis ini dipandang relevan, karena data lapangan merupakan hasil observasi dan wawancara. Data dimaksud cukup banyak dan tidak seluruhnya disajikan, oleh karena itu mesti dilakukan pengurangan data, sebelum disajikan.⁵³

⁵² Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, hal.16-18

⁵³ Abdul Qodir, *metodologi riset kualitatif panduan dasar melakukan penelitian Ilmiah*, Palangka Raya, t.np, 1999, hal. 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kelurahan Pahandut

Dalam karya tulis ini akan digambarkan sejarah Kelurahan Pahandut yang menjadi lokasi penelitian. Kelurahan Pahandut merupakan unit organisasi pemerintah yang berada di bawah Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan tengah. Kelurahan ini berasal dari sebuah dukuh yang didiami oleh Pak Handut sekeluarga dan selanjutnya nama Pahandut itu lebih dikenal dengan nama Dukuh Pahandut.

Bila dilihat dari perkembangan Kota Palangka Raya, maka Kelurahan Pahandut merupakan embrio Kota Palangka Raya yang juga merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Kelurahan Pahandut mempunyai luas wilayah 950 ha⁵⁴ terdiri dari beberapa kondisi alam, yaitu sebagian di bantaran sungai berawa-rawa dan perkampungan. Sedangkan tanahnya terdiri dari beberapa keadaan. Pada umumnya, keadaan tanah lebih banyak mengandung pasir. Keadaan ini kurang menguntungkan bila dipergunakan sebagai lahan pertanian.

Secara geografis, Kelurahan Pahandut mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pahandut Seberang.

⁵⁴ SK Walikota No. 31 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pinang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panarung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Langkai.

Seperti daerah-daerah lainnya di Kalimantan Tengah, Suhu daerah ini berkisar antara $30^{\circ} - 34^{\circ} \text{ C}$, dengan iklim tropis, hutan kecil dan berawa-rawa. Keadaan udara termasuk lembab dan tanah terdiri dari daratan dan rawa.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Kelurahan Pahandut saat ini berjumlah 23.703 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.905 KK. Penduduk kelurahan ini tersebar di 26 Rukun Warga (RW) dan di 96 Rukun Tetangga (RT).

Pertambahan penduduk di Kelurahan Pahandut berasal dari kelahiran, pertambahan pemukiman baru, pendatang dan anak-anak sekolah atau kuliah dari luar Kota Palangka Raya.

Data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT
TAHUN 2010/2011

| No | Kelompok Usia | Jumlah Jiwa | | |
|--------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0-1 Tahun | 308 | 294 | 602 |
| 2 | 2-6 Tahun | 1.080 | 1.197 | 2.277 |
| 3 | 7-12 Tahun | 1.234 | 1.369 | 2.603 |
| 4 | 13-15 Tahun | 728 | 752 | 1.480 |
| 5 | 16-18 Tahun | 700 | 738 | 1.438 |
| 6 | 19-24 Tahun | 1.189 | 1.341 | 2.530 |
| 7 | 25-29 Tahun | 962 | 984 | 1.946 |
| 8 | 30-34 Tahun | 1.125 | 1.074 | 2.199 |
| 9 | 35-39 Tahun | 912 | 963 | 1.875 |
| 10 | 40-44 Tahun | 817 | 885 | 1.702 |
| 11 | 45-49 Tahun | 659 | 715 | 1.374 |
| 12 | 50-54 Tahun | 488 | 501 | 989 |
| 13 | 55-59 Tahun | 460 | 535 | 995 |
| 14 | 60-64 Tahun | 316 | 446 | 762 |
| 15 | 65-69 Tahun | 226 | 211 | 437 |
| 16 | 70 Tahun keatas | 222 | 272 | 494 |
| Jumlah | | 11.426 | 12.277 | 23.703 |

Sumber data: Dokumentasi Kelurahan Pahandut Data Penduduk tahun 2010/2011

Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 2603 orang adalah anak yang berusia 7-12 tahun. Adapun anak usia 13-15 tahun sebanyak 1480 orang.

Kondisi ekonomi penduduk berada di golongan menengah ke bawah. Hal ini dilihat dari mata pencaharian yang dilakoni oleh penduduk setempat. Meskipun pekerjaan penduduk beraneka macam, seperti pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Swasta (BUMN/BUMD), buruh, wiraswasta, petani, dan nelayan, umumnya pekerjaan penduduk setempat adalah PNS, buruh, dan wiraswasta.

Untuk lebih jelas keadaan penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

TABEL 2
PEKERJAAN PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT
TAHUN 2010/2011

| No | Kelompok Usia | Jumlah Jiwa | | Jumlah |
|----|----------------|-------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PNS/GURU/DOSEN | 555 | 489 | 1.044 |
| 2 | TNI | 216 | - | 216 |
| 3 | POLRI | 60 | - | 60 |
| 4 | PEGAWAI SWASTA | 157 | 21 | 178 |
| 5 | WIRASWASTA | 584 | 353 | 937 |
| 6 | PETANI | 28 | 10 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 7 | NELAYAN | 138 | 18 | 156 |
| 8 | BURUH | 565 | 219 | 784 |
| 9 | LAIN-LAIN | 1.847 | 1.686 | 3.560 |
| JUMLAH | | 4.171 | 2.802 | 6.973 |

Sumber data: Dokumentasi Kelurahan Pahandut Data Pekerjaan Penduduk tahun 2010/2011

Dari jumlah penduduk Kelurahan Pahandut yang berjumlah 23.703 jiwa, pekerjaan penduduk Kelurahan Pahandut yang tercatat dalam dokumentasi kelurahan hanya berjumlah 6.973 jiwa. Data ini menggambarkan adanya sebesar 14.730 jiwa yang pekerjaannya tidak tercatat atau tidak diketahui.

Menurut MK Staf Pemerintahan kelurahan Pahandut, bahwa:

Perbedaan yang cukup jauh antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah seluruh penduduk Kelurahan Pahandut terjadi karena penduduk di Kelurahan Pahandut banyak yang berdomisili tidak menetap sehingga susah untuk didata dengan benar. 16.730 jiwa dikurang anak di bawah usia sekolah dan usia sekolah yang berjumlah 8400 jiwa maka ada 8330 jiwa yang tidak jelas pekerjaannya. Hal ini terjadi karena di kelurahan tersebut banyak yang bekerja di luar wilayahnya dan ditambah ibu rumah tangga, serta para lansia dan yang menderita cacat. Sehingga jumlah pekerja di kelurahan hanya 6.973 jiwa.⁵⁵

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tidak jelas pekerjaannya merupakan penduduk yang tidak jelas pekerjaannya di Kelurahan Pahandut, para lansia dan ibu rumah tangga, serta penduduk yang cacat maupun gila.

⁵⁵ Wawancara dengan MK Staff Pemerintahan Kelurahan Pahandut tanggal 28 Maret 2012.

3. Prasarana pendidikan

Pendidikan merupakan jalan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sarana pendidikan sangatlah penting bagi kelangsungan dan kelancaran pendidikan.

Kelurahan Pahandut dalam hal ketersediaan prasarana pendidikan sudah cukup bagus, hal ini sangatlah membantu bagi kelangsungan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Adapun Prasarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Pahandut antara lain:

TABEL 3

PRASARANA PENDIDIKAN TAHUN 2010/2011

| No | Jenis Prasarana | Jumlah |
|----|--------------------|---------|
| 1 | TK | 8 buah |
| 2 | SD/MI/Sederajat | 16 buah |
| 3 | SLTP/MTs/Sederajat | 3 buah |
| 4 | SLTA/MA/Sederajat | 2 buah |

Sumber data: Dokumentasi Kelurahan Pahandut Data Prasarana Pendidikan tahun 2010/2011

4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Pahandut

Penduduk Kelurahan Pahandut terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Untuk lebih jelas pendidikan penduduk Kelurahan Pahandut adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN PAHANDUT
TAHUN 2010/2011

| No | Kelompok Usia | Jumlah Jiwa | | Jumlah |
|--------|---------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Belum Sekolah | 1.563 | 1.355 | 2.918 |
| 2 | Tidak Tamat Sekolah | 4.697 | 5.193 | 9.890 |
| 3 | SD/ Sederajat | 1.754 | 1.879 | 3.633 |
| 4 | SLTP/ Sederajat | 1.004 | 1000 | 2.004 |
| 5 | S/LTA/ Sederajat | 1.914 | 2.292 | 4.206 |
| 6 | Tamat Akademi/ Sederajat | 162 | 189 | 351 |
| 7 | Tamat Sarjana (S-1) | 263 | 291 | 554 |
| 8 | Tamat Pasca Sarjana (S-2) | 9 | 3 | 12 |
| 9 | Tamat Doktor (S-3) | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Buta Huruf | 58 | 74 | 132 |
| Jumlah | | 11.426 | 12.277 | 23.703 |

Sumber data: Dokumentasi Kelurahan Pahandut Data Pendidikan Penduduk tahun 2010/2011

B. Penyajian dan Analisis Data

Data yang akan disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian, penjelasan, dan tabulasi.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi dan wawancara kepada subjek dan Informan, serta didukung oleh dokumentasi. Data yang akan disajikan dalam penyajian dan analisis data ini sebagai berikut:

6. Anak usia 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut.
7. Anak berusia 13-15 tahun sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kelurahan Pahandut.
8. Angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.
9. Angka partisipasi kasar dan murni sesuai dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut.
10. Anak Usia SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah
11. Kendala-kendala yang dihadapi melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut baik orang tua maupun pemerintah.
12. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Data mengenai evaluasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kelurahan Pahandut tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Anak usia 7-12 Tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut.

Berdasarkan dokumentasi bagian Information and Communication Technology (ICT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya, didapatkan data sebagai berikut:

TABEL 5

ANAK USIA 7-12 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN SD/MI dan PONDOK PESANTREN TINGKAT ULA DI KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011

| NO | LEMBAGA PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|----------------------|---------------|-----------|--------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SDN 1 Pahandut | 140 | 108 | 248 |
| 2 | SDN 2 Pahandut | 99 | 102 | 201 |
| 3 | SDN 3 Pahandut | 136 | 110 | 246 |
| 4 | SDN 4 Pahandut | 122 | 111 | 233 |
| 5 | SDN 5 Pahandut | 169 | 159 | 328 |
| 6 | SDN 6 Pahandut | 53 | 42 | 95 |
| 7 | SDN 7 Pahandut | 170 | 178 | 348 |
| 8 | SDN 8 Pahandut | 42 | 48 | 90 |
| 9 | SDS 1 kristen | 53 | 42 | 95 |
| 10 | SDN 1 Tumbang Rungan | 40 | 51 | 91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------------------|------|------|------|
| 11 | MIS Islamiyah | 155 | 140 | 295 |
| 12 | MIS NU Palangka Raya | 339 | 319 | 658 |
| 13 | MIS Darul Ulum | 190 | 196 | 386 |
| 14 | MIS Miftahul Huda 1 | 249 | 267 | 516 |
| 15 | MIS Darul Mu'allaf (1-3) | 23 | 24 | 47 |
| 16 | MIS Hidayatul Insan | 109 | 112 | 221 |
| 17 | Darul Ulum (ULA) | 63 | 82 | 145 |
| 18 | Hidayatul Insan (ULA) | 29 | 36 | 65 |
| Jumlah | | 2181 | 2127 | 4308 |

Sumber data : Dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Agama, data siswa SD dan MI menurut jenis kelamin tahun 2010/2011 dan Santri Pondok Pesantren tingkat ULA tahun 2010/2011.

Dari data di atas tergambar bahwa anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut adalah sebesar 4098 siswa dan ditambah jumlah santri Pondok Pesantren yang berjumlah 210 siswa, maka hasilnya 4308 siswa atau sebesar 165,50% anak usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD/MI/ sederajat.

Adapun Paket A untuk membantu anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah supaya bisa melanjutkan tidak diselenggarakan pada lembaga pendidikan maupun PKBM di Kelurahan Pahandut.

Menurut SW Kepala Bagian PNFI bahwa di Kelurahan Pahandut tidak diselenggarakan Paket A karena anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut hampir semua sudah mengikuti pendidikan SD/MI/ sederajat.⁵⁶

Adapun data anak di bawah usia 7 tahun dan di atas usia 12 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut tergambar dalam tabel berikut.

TABEL 6

**ANAK DI BAWAH 7 TAHUN DAN DI ATAS 12 TAHUN YANG
SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN SD/MI DI KELURAHAN
PAHANDUT TAHUN 2010/2011**

| NO | LEMBAGA PENDIDIKAN | USIA | | JUMLAH |
|----|-----------------------|-----------|------------|--------|
| | | < 7 tahun | > 12 tahun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SDN 1 Pahandut | 17 | - | 17 |
| 2 | SDN 2 Pahandut | 26 | - | 26 |
| 3 | SDN 3 Pahandut | 30 | 3 | 33 |
| 4 | SDN 4 Pahandut | 48 | - | 48 |
| 5 | SDN 5 Pahandut | 58 | 3 | 61 |
| 6 | SDN 6 Pahandut | 22 | 5 | 27 |
| 7 | SDN 7 Pahandut | 31 | - | 31 |

⁵⁶ Wawancara dengan SW Kepala Bagian PNFI pada Tanggal 6 April 2012

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------------------|-----|----|-----|
| 8 | SDN 8 Pahandut | 5 | 4 | 9 |
| 9 | SDS 1 kristen | 22 | 5 | 27 |
| 10 | SDN 1 Tumbang Rungan | 12 | 1 | 13 |
| 11 | Mis Islamiyah | 35 | - | 35 |
| 12 | Mis NU Palangka Raya | 107 | - | 107 |
| 13 | Mis Darul Ulum | 64 | - | 64 |
| 14 | Mis Miftahul Huda 1 | 34 | - | 34 |
| 15 | Mis Darul Mu'allaf (1-3) | - | - | - |
| 16 | Mis Hidayatul Insan | - | - | - |
| Jumlah | | 511 | 21 | 532 |

Sumber data: Dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Agama, data siswa sekolah SD dan MI menurut umur tahun 2010/2011.

Pada tabel 6 di atas disebutkan data anak usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun sebesar 532 siswa. Data tersebut sebagai pengurang untuk data anak yang sedang mengikuti pendidikan SD/MI/Sederajat yang berjumlah 4308 siswa, maka jumlah anak yang benar-benar berada pada usia 7 – 12 tahun yang masih sekolah di SD/MI adalah 3776 siswa. Jumlah ini melebihi

jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang ada di Kelurahan Pahandut, yaitu hanya sebesar 2603 jiwa atau sebesar 145,06% yang mengikuti pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut.

Berdasarkan wawancara dengan SM Staf Mapenda Kementerian Agama Kota Palangka Raya, bahwa:

Lebih banyaknya jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut daripada jumlah penduduknya, dikarenakan tidak meratanya orang dalam memilih lembaga pendidikan, sehingga penduduk kelurahan lain bersekolah di Kelurahan Pahandut. Hal ini menjadi penyebab jumlah siswa SD/MI melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.⁵⁷

Dari data yang disajikan dalam tabel 5 dan 6 diketahui bahwa sangat banyak anak usia sekolah 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD/MI bahkan melebihi jumlah penduduknya. Kondisi ini terjadi karena anak-anak yang bersekolah di Kelurahan Pahandut tersebut tidak semuanya dari lingkungan Kelurahan Pahandut melainkan dari kelurahan lain. Selebihnya tidak menutup kemungkinan anak di Kelurahan Pahandut mengikuti pendidikan di luar Kelurahan Pahandut dengan berbagai macam alasan.

2. Anak usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kelurahan Pahandut.

Dari Dokumentasi yang peneliti peroleh dengan Staff Mapenda Kementerian Agama Kota Palangka Raya, dapat penulis sajikan data anak usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan di MTs sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara dengan SM Staff Mapenda Kementrian Agama Kota Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012.

TABEL 7

**ANAK USIA 13-15 TAHUN YANG SEDANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN MTs dan PONDOK PESANTREN TINGKAT
WUSTHO DI KELURAHAN PAHANDUT
TAHUN 2010/2011**

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|--------|-----------------------------|---------------|-----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | MTs Darul Ulum | 121 | 178 | 299 |
| 2 | MTs Hidayatul Insan | 129 | 78 | 232 |
| 3 | MTs Islamiyah | 118 | 119 | 237 |
| 4 | Darul Ulum (Wustho) | 35 | 50 | 85 |
| 5 | Hidayatul Insan (Wushto) | 38 | 32 | 70 |
| Jumlah | | 441 | 457 | 898 |

Sumber data: Dokumentasi Kementerian agama, data siswa MTs menurut jenis kelamin tahun 2010/2011 dan santri pondok pesantren tingkat wustho tahun 2010/2011.

Adapun untuk lembaga pendidikan SMP tidak terdapat di Kelurahan Pahandut. Menurut MN bahwa:

“Lembaga pendidikan SMP tidak ada di Kelurahan Pahandut karena di Kelurahan Pahandut sudah ada 3 lembaga pendidikan swasta dan pondok pesantren. Selain itu Kelurahan Pahandut dekat dengan Kelurahan Langkai yang banyak lembaga pendidikan SMP”.⁵⁸

Sedangkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang menyediakan paket B ada 2 buah di Kelurahan Pahandut, antara lain:

⁵⁸ Wawancara dengan MN Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Tanggal 28 Mei 2012.

TABEL 8

**ANAK USIA 13-15 TAHUN YANG MENGIKUTI PAKET B DI
KELURAHAN PAHANDUT TAHUN 2010/2011**

| NO | PKBM | PAKET B | | | JUMLA H |
|----|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| | | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | |
| 1 | LUTHFILLAH | 25 | 25 | 40 | 90 |
| 2 | CANDRA KIRANA | - | 25 | 40 | 65 |
| | T O T A L | 25 | 50 | 80 | 155 |

Sumber data: Dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bagian PNFI, data PKBM penyelenggara Paket B di kelurahan Pahandut tahun 2010/2011.

Tabel di atas menggambarkan bahwa penduduk Kelurahan Pahandut yang berusia 13-15 sedang menempuh pendidikan MTs dan santri pondok pesantren tingkat wustho berjumlah 898 siswa ditambah murid PKBM yang mengikuti Paket B yang berjumlah 155 siswa, maka jumlah keseluruhannya 1053 siswa dari 1480 siswa atau sebesar 71,14% penduduk Kelurahan Pahandut yang berusia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan SMP/MTs/ sederajat.

Adapun data usia di bawah 13 dan di atas 15 tahun yang sedang menempuh pendidikan MTs di Kelurahan Pahandut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 9

**ANAK USIA DI BAWAH 13 DAN DI ATAS 15 TAHUN YANG
SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN MTs DI KELURAHAN
PAHANDUT TAHUN 2010/2011**

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|--------|-----------------------|---------------|------------|--------|
| | | < 13 tahun | > 15 tahun | |
| 1 | MTs Darul Ulum | 60 | - | 60 |
| 2 | MTs Hidayatul Insan | 60 | - | 60 |
| 3 | MTs Islamiyah | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 121 | - | 121 |

Sumber data: Dokumentasi Kementerian Agama, data siswa Mts menurut umurnya tahun 2010/2011.

Pada tabel di atas disebutkan data anak usia di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun sebesar 121 siswa. Data ini sebagai pengurang jumlah anak yang mengikuti pendidikan SMP/MTs yang seluruhnya berjumlah 1053 siswa, maka jumlah anak yang benar-benar berada pada usia 13-15 tahun yang masih sekolah di MTs adalah 932 siswa.

Jumlah ini lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kelurahan Pahandut, yaitu hanya sebesar 1480 jiwa penduduk usia 13-15 tahun atau sebesar 62,97 %.

Berdasarkan wawancara dengan SM Staf Mapenda Kementerian Agama Kota Palangka Raya, yaitu:

Sedikitnya jumlah usia anak 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut yang sedang bersekolah dibandingkan jumlah penduduk dikarenakan terbatasnya jumlah lembaga pendidikan yang tersedia. Hal ini

menyebabkan anak usia 13-15 tahun di Kelurahan Pahandut mengikuti pendidikan di luar kelurahan tersebut.⁵⁹

Untuk tingkat pendidikan dasar (MTs) yang berada di Kelurahan Pahandut jika dibandingkan jumlah penduduk dengan jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut jauh beda. Hal ini disebabkan oleh banyak anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar Kelurahan Pahandut, karena di Kelurahan Pahandut hanya terdapat 3 buah MTs swasta, 2 buah Pondok pesantren dan 2 buah PKBM. Karena itu, jumlah siswa yang sekolah lebih sedikit daripada jumlah penduduknya. Selain kurang peminatnya, ada beberapa anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah dengan berbagai alasan.

3. Angka partisipasi kasar dan murni anak usia 7-12 tahun di kelurahan Pahandut.

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan kelompok penduduk yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.⁶⁰ Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung APK, yaitu:

$$APK = \frac{\text{Jumlah siswa tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

Diketahui bahwa jumlah murid SD/MI tahun 2010/2011 adalah 4308 siswa dan jumlah penduduk Kelurahan Pahandut umur 7-12 tahun

⁵⁹ Wawancara dengan SM Staff Mapenda Kementerian Agama Kota Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012.

⁶⁰ Ida Kintamani, *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, Vol.15 edisi khusus I agustus 2009, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, hal.182

adalah 2603 orang. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan angka partisipasi kasar (APK), yaitu:

$$APK = \frac{4308 \text{ orang}}{2603 \text{ orang}} \times 100 = 165,50 \%$$

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya, maka angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI yang diperoleh untuk lingkup Kelurahan Pahandut adalah 165,50%.

Tingginya angka partisipasi kasar untuk tingkat SD/MI seperti membuktikan bahwa wajib belajar pendidikan dasar telah terlaksana dengan baik, namun setelah ditelusuri ternyata masih ada anak yang putus sekolah sehingga itu berarti tidak 100% anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut telah mengikuti pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.⁶¹ Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung APM, yaitu:

$$APM = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia Tertentu}} \times 100$$

⁶¹ *Ibid*, hal.181

Diketahui bahwa Murid SD/MI usia 7-12 tahun adalah 3776 orang dan Penduduk usia 7-12 tahun adalah 2603 orang. Dengan menggunakan rumus di atas maka didapatkan angka partisipasi murni (APM), yaitu:

$$APM = \frac{3776 \text{ orang}}{2603 \text{ orang}} \times 100 = 145.06 \%$$

Data angka partisipasi murni (APM) Kelurahan Pahandut di atas didapat dari perhitungan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun sebanyak 3776 dibagi jumlah penduduk Kelurahan Pahandut yang berusia 7-12 tahun sebanyak 2603 orang dan hasilnya sebesar 145.06 %.

Data di atas menggambarkan bahwa Angka Partisipasi Murni melebihi jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah SD/MI sebanyak 2603 jiwa.

Menurut SM Staf mapenda Kementrian Agama Kota Palangka Raya:

Tingginya Angka Partisipasi Murni melebihi 100 % dikarenakan lonjakan jumlah siswa dari kelurahan lain yang mengikuti pendidikan di kelurahan tersebut. Hal ini menyebabkan Angka Partisipasi Murni yang seharusnya cukup sampai 100 % menjadi melebihi 100 %.⁶²

Dari apa yang disampaikan SM bahwa tingginya angka partisipasi murni SD/MI bahkan sampai melebihi 100% karena banyak lembaga pendidikan yang terdapat di Kelurahan Pahandut sehingga banyak siswa dari kelurahan lain yang bersekolah di Kelurahan Pahandut. Oleh karena itu terjadi lonjakan jumlah siswa di Kelurahan Pahandut. Jadi angka

⁶² Wawancara dengan SM Staff Mapenda Kementrian Agama Kota Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012.

partisipasi kasar dan murni yang dicapai melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.

Jika dibandingkan jumlah siswa SD/MI dengan jumlah penduduk Kelurahan Pahandut usia 7-12 tahun, maka dapatlah dikatakan bahwa Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut yang mengikuti wajib belajar 9 tahun untuk anak usia 7-12 tahun mencapai 100% anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kelurahan Pahandut mengikutinya. Selebihnya tidak menutup kemungkinan adanya anak yang putus sekolah.

4. Angka partisipasi kasar dan murni anak usia 13-15 tahun di kelurahan Pahandut

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan kelompok penduduk yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.⁶³ Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung APK, yaitu:

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

Diketahui bahwa jumlah murid SMP/MTs tahun 2010/2011 sebanyak 1053 orang dan jumlah anak umur 13 – 15 tahun sebanyak 1480 orang. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan angka partisipasi kasar yaitu:

⁶³ Ida Kintamani, *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, hal.182

$$APK = \frac{1053 \text{ orang}}{1480 \text{ orang}} \times 100 = 71.14 \%$$

Berdasarkan atas data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari Kementrian Agama Kota Palangka Raya, maka angka partisipasi kasar untuk MTs yang dilingkup Kelurahan Pahandut adalah 71.14 %.

Ini berarti bahwa angka partisipasi kasar SMP/MTs di Kelurahan Pahandut ini masih kurang dari 100%. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menuntaskannya.

b. Angka Partisipasi Murni

APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.⁶⁴

Rumus yang digunakan untuk menghitung APM, yaitu:

$$APM = \frac{\text{Jumlah murid kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$$

Diketahui bahwa Murid SMP/MTs usia 13-15 tahun adalah 932 orang dan Penduduk usia 13-15 tahun adalah 1480 orang. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan angka partisipasi murni yaitu:

$$APM = \frac{932 \text{ orang}}{1480 \text{ orang}} \times 100 = 62.97 \%$$

Data angka partisipasi murni Kelurahan Pahandut di atas didapat dari perhitungan jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 932 orang dibagi

⁶⁴ Ida Kintamani, *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, hal.181

jumlah penduduk Kelurahan Pahandut yang berusia 13-15 tahun sebanyak 1480 orang, dengan hasilnya sebesar 62.97 %.

Menurut SM Staff Mapenda Kementrian Agama bahwa:

Rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SMP/MTs di Kelurahan Pahandut dikarenakan jumlah lembaga pendidikan tingkat SMP/MTs yang sedikit. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang bersekolah di luar Kelurahan Pahandut dan juga karena adanya penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rendahnya Angka partisipasi kasar dan murni tingkat SMP/Mts di Kelurahan Pahandut terjadi karena terbatasnya lembaga pendidikan sehingga banyak anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar Kelurahan Pahandut.

Ini berarti karena sedikitnya jumlah lembaga pendidikan di Kelurahan Pahandut menyebabkan anak usia 13-15 tahun tidak berminat bersekolah di Kelurahan Pahandut dan lebih memilih bersekolah di Luar Kelurahan Pahandut yang banyak terdapat sekolah favorit, serta ditambah anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah.

5. Anak usia SD/MI dan SMP/MTs yang Putus Sekolah

Berdasarkan informasi dari Ketua RW/RT dan masyarakat setempat, terdapat beberapa anak yang putus sekolah dikarenakan berbagai macam hal. Dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁵ Wawancara dengan SM Staff Mapenda Kementrian Agama Kota Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012.

TABEL 12

ANAK PUTUS SEKOLAH SD/MI dan SMP/MTs DI KELURAHAN PAHANDUT

| NO | RW | SD/MI | | | | | | | jumlah | SMP/MTs | | | | | | | jumlah |
|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|----|----|----|----|----|--------|
| | | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | I | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 2 | II | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 3 | III | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | - |
| 4 | IV | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | - |
| 5 | V | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | - |
| 6 | VI | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 7 | VII | 8 | 7 | 10 | 5 | | | | 30 | 1 | 3 | | | | | | 4 |
| 8 | VIII | - | - | - | | | | | - | - | 2 | - | | | | | 2 |
| 9 | IX | - | 2 | - | - | | | | 2 | 5 | 1 | - | 1 | | | | 7 |
| 10 | X | - | - | | | | | | - | - | - | | | | | | -- |
| 11 | XI | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | -- |
| 12 | XII | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 13 | XIII | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 14 | XIV | - | - | - | 6 | | | | 6 | - | - | - | - | | | | - |
| 15 | XV | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 16 | XVI | - | - | 4 | - | - | - | | 4 | - | - | - | - | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|-------|---|---|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | XVII | - | - | - | - | | | | - | - | - | 2 | - | | | | 2 |
| 18 | XVIII | 1 | - | - | - | | | | 1 | 3 | - | - | - | | | | 4 |
| 19 | XIX | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 20 | XX | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 21 | XXI | - | - | 10 | 3 | | | | 13 | - | - | 3 | 2 | | | | 5 |
| 22 | XXII | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | - |
| 23 | XXIII | - | - | | | | | | - | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| 24 | XXIV | - | - | | | | | | - | - | - | | | | | | - |
| 25 | XXV | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 26 | XXVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 9 | 9 | 24 | 14 | - | - | - | 56 | 10 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 26 |

Berdasarkan tabel di atas anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut berjumlah 56 siswa. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs berjumlah 26 siswa.

Ini berarti masih ada penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan yang nantinya memberi dampak kebodohan pada generasi muda.

Adapun RW I, II, III, IV, V dari keterangan warga setempat dan observasi yang dilakukan ternyata tidak terdapat anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini karena wilayah RW I sampai RW V tidak jauh dari lembaga pendidikan baik yang di Kelurahan Pahandut

ataupun di kelurahan lain sehingga memudahkan dan menarik minat anak-anak untuk bersekolah.

Adapun RW VI, X, XI, XII, XIII, menurut masing-masing Ketua RW, anak SD/MI dan anak SMP/Mts sudah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun karena pada wilayah ini terdapat 4 lembaga pendidikan sehingga dapat mempermudah dan menarik minat anak untuk bersekolah.

Pada RW XV dan XIX menurut keterangan Ketua RW sudah tidak ada anak-anak usia 712 tahun dan 13-15 tahun yang tidak bersekolah.

Untuk RW XX, XXII, XXIV, XXV, dan XXVI menurut ketua RW dan warga setempat, anak-anak SD/MI sudah mengikuti pendidikan SD/MI, sedangkan anak SMP/MTs yang putus sekolah sudah mengikuti pendidikan melalui Paket B yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Kelurahan Pahandut.

Anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah disebabkan oleh alasan yang beraneka ragam. Adapun alasan beberapa anak di Kelurahan Pahandut yang putus sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Ahmad siswa kelas 4 SD tinggal di gang hikmah RW VII. Dia putus sekolah karena tidak berani dengan guru gara-gara dimarahi.
- b. Muhammad Rafi,i siswa kelas 2 Mts tinggal di gang taufik RW VIII. Dia Putus sekolah karena ingin bekerja membantu orang tua.
- c. Misna siswa kelas 2 SMPN tinggal di gang Sari 45 RW IX. Dia putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah.

- d. Fendi siswa kelas 4 SD tinggal di gang warga RW XIV. Dia putus sekolah karena Rambutnya dipotong (kutel) guru sehingga dia tidak mau lagi masuk sekolah.
- e. Samiyah siswa kelas 3 MI tinggal di gang Mandau RW XVI. Dia putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan lagi.
- f. Ahmad siswa kelas 2 SMP tinggal di gang Asmara RW XVII. Dia putus sekolah karena tidak ada kemauan untuk sekolah.
- g. Fahrunnisa siswa kelas 3 Mts tinggal di Jl.Sumbawa RW XVIII. Dia putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah.
- h. Muhammad Syafi'I siswa kelas 1 SMP tinggal di gang Damai RW XXI. Dia putus sekolah karena ingin bekerja membantu orang tuanya.
- i. Muhammad Fahri siswa kelas 1 Mts tinggal di gang Damang Syawal RW XXIII. Dia putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah.

6. Kendala-kendala yang dihadapi melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kelurahan Pahandut.

Berdasarkan wawancara dengan MN pegawai Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya dijelaskan bahwa:

Dana pemerintah daerah untuk menuntas wajib belajar 9 tahun sangat terbatas. Keterbatasan ini dirasakan mengingat di Kota Palangka Raya terdapat jumlah guru hampir mencapai 4000 orang. Oleh karena itu, anggaran untuk pendidikan banyak disalurkan untuk pembayaran gaji guru.

Di sisi lain, sumber daya manusia juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan di Kota Palangka Raya masih ada guru-guru yang berpendidikan SLTA/ sederajat.

Kendala lain yang dihadapi adalah banyaknya usia sekolah pendidikan dasar yang datang dari daerah lain yang kemudian tidak sekolah dengan alasan yang beragam. Sementara itu, pemerintah Kota Palangka Raya juga mendapatkan kesulitan untuk mengawasi lokasi lembaga penyelenggara pendidikan/sekolah yang berada di lokasi yang sukar akses jalannya.⁶⁶

Adapun data yang didapat dari AS pegawai Kementrian Agama bagian POKJAWAS melalui wawancara tentang kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Dari segi SDM, kendala yang dihadapi ialah sebagian guru mengajar tidak sesuai keahliannya, seperti sarjana PAI mengajar olahraga.

Kendala yang dihadapi kementerian berkaitan dengan pelaksanaan wajar 9 tahun adalah kurangnya dana dan sering terlambatnya dana ke kesatuan kerja, serta munculnya isu politik yang memanfaatkan pendidikan untuk menambah popularitas seorang calon. Misalnya, sang calon menjanjikan pendidikan gratis.

Dari segi pengawasan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama antara kepala sekolah dengan pengawas. Pengawas yang datang dianggap mengganggu kegiatan sekolah, sehingga kepala sekolah sering tidak di tempat ketika pengawas berkunjung ketempat tersebut, dan ada guru yang seharusnya mengajar sering tidak ada di tempat ketika jam pelajaran berlangsung dengan tanpa pemberitahuan yang jelas.⁶⁷

Dari keterangan diatas kendala yang dialami oleh pemerintah adalah keterbatasan dan keterlambatan dana untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, tenaga pendidik yang tidak sesuai keahlian dan ada yang masih berpendidikan SMA/ sederajat, serta kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dan pengawas yang sebenarnya untuk membantu kesulitan yang dihadapi pihak sekolah.

⁶⁶ Wawancara dengan MN pada tanggal 22 Desember 2011 di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya.

⁶⁷ Wawancara dengan AS pada tanggal 20 Desember 2011 di Kantor Kementrian Agama Kota Palangka Raya.

Adapun kendala yang dirasakan masyarakat sehingga banyak anak yang putus sekolah, sebagai berikut:

Menurut Ketua RW VII AJ mengatakan:

Anak-anak usia sekolah di Kelurahan Pahandut putus sekolah karena mahal biaya pendidikan sehingga banyak orang tua yang tidak mampu membiayai, serta kurangnya motivasi sehingga ada beberapa anak yang tidak ada kemauan untuk sekolah.⁶⁸

Sedangkan menurut BN Ketua RT 1 RW XXI mengatakan bahwa:

Mahal biaya pendidikan sekarang ini membuat orang tua murid kesulitan untuk menyekolahkan anak mereka. Banyak orang tua yang berharap bantuan pemerintah akan tetapi bantuan tersebut tidak semua menikmati sehingga masih ada anak yang putus sekolah.⁶⁹

Menurut HY orangtua siswa bahwa:

Pendidikan yang mahal membuat orang tua kesulitan menyekolahkan anak mereka. Sehingga banyak anak yang putus sekolah karena mahal biaya. Selain itu karena kurangnya motivasi tentang pentingnya sekolah dari orang tua atau pihak yang ada sangkut pautnya.

7. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan kewajiban belajar 9 tahun. Adapun upaya dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah:

- a. Mengusulkan bantuan tambahan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menutupi kekurangan yang terjadi.
- b. Pengadaan kuliah percepatan untuk guru-guru yang masih berpendidikan SLTA/ sederajat, serta memberikan bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang diharuskan.
- c. Pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan untuk anak usia sekolah pendidikan dasar menempuh pendidikan dan belajar melalui paket A, paket B, dan sekolah terbuka.

⁶⁸ Wawancara dengan AJ Ketua RW VII pada tanggal 29 Mei 2012

⁶⁹ Wawancara dengan BN Ketua RT 1 RW XXI pada tanggal 30 Mei 2012

- d. Melakukan upaya pengawasan/ monitoring kelancaran program wajib belajar 9 tahun. Kalau ternyata ditemukan kendala yang dihadapi, segera dicarikan jalan keluar.⁷⁰

Adapun upaya dilakukan Kementrian Agama Kota Palangka Raya untuk mengatasi kendala itu adalah sebagai berikut:

- a. Guru yang mengajar bukan keahliannya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipegangnya tersebut.
- b. Melakukan kerjasama sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah sebagai solusi yang dilakukan berkaitan dengan kurangnya dana.
- c. Memberi teguran atau nasehat secara tertulis. Untuk guru yang melalaikan tugas diberi teguran oleh kepala sekolah untuk disiplin. Jika tidak ditanggapi atau melawan, maka kepala sekolah bisa mengajukan permohonan untuk memindahkan guru yang tidak disiplin tersebut.⁷¹

Melihat upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi menjadi gambaran kesungguhan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

C. PEMBAHASAN

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan kebijakan pemerintah di dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki standar pendidikan minimal 9 tahun sebagai modal dasar pembangunan bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas kerja tenaga terdidik dimasa mendatang.

⁷⁰ Wawancara dengan MN pada tanggal 22 Desember 2011 di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya.

⁷¹ Wawancara dengan AS pada tanggal 20 Desember 2011 di Kantor Kementrian Agama Kota Palangka Raya.

Anak usia 7-15 tahun merupakan peserta didik tingkat pendidikan dasar yang diharuskan dan diharapkan mendapat pendidikan yang layak dan bermutu dengan adanya program wajib belajar ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni:

4. Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.⁷²

1. Anak usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD/MI

Anak usia 7-12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SD/MI jumlahnya 4308 siswa atau sebesar 165,50% yang sedang mengikuti pendidikan SD/MI di Kelurahan Pahandut. Akan tetapi masih ada 56 orang anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah. Hal ini berarti undang-undang dasar maupun undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional belum dapat dilaksanakan pemerintah sepenuhnya.

Dampak anak putus sekolah yang nantinya dirasakan menjadikan generasi muda bodoh, bertambahnya angka pengangguran dan tindak kriminal dalam masyarakat. Sedangkan dampaknya bagi Negara berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Anak usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan SMP/MTs

Anak usia sekolah 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SMP/MTs jumlahnya 1053 siswa atau sebesar 71,14% yang sedang mengikuti pendidikan SMP/MTs lebih sedikit daripada jumlah penduduk

⁷² Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pasal 34. Hal.253

usia 13-15 tahun yang berjumlah 1480, serta masih ada 26 orang anak yang putus sekolah. Jadi, undang-undang dasar maupun undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional masih belum terlaksana sepenuhnya.

Seperti di atas dampak yang nantinya dirasakan menjadikan generasi muda bodoh, bertambahnya angka pengangguran dan tindak kriminal dalam masyarakat. Sehingga dapat memberi citra buruk bagi Negara.

3. Angka partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator penilaian untuk menilai keberhasilan suatu program yang dibuat. Dengan Angka partisipasi dapat dilihat apakah program tersebut di sukai atau kurang di sukai. Semakin besar angka partisipasi maka program tersebut berkualitas. Angka Partisipasi Kasar dicari untuk membandingkan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu.

Sebagaimana dikemukakan Muhammad Husin bahwa: “Angka Partisipasi Kasar adalah persentase jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu”.⁷³

Angka partisipasi kasar tingkat pendidikan SD/MI mencapai 165,50% cukup tinggi yang artinya program ini terlaksana walaupun belum sepenuhnya. Sedangkan tingkat pendidikan SMP/MTs APK yang dicapai hanya 71,14% yang berarti perlu perhatian khusus dari pemerintah supaya

⁷³ Muhammad Husin, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16 N0.1 januari 2010, Badan penelitian dan Pengembangan kementerian Pendidikan Nasional, hal. 95

program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terlaksana dengan tuntas.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni tidak jauh berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar akan tetapi pada Angka Partisipasi Murni membandingkan dengan melihat usia standar pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai standar. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM jika mencapai 100%, maka dipakai untuk melihat keberhasilan program yang dilaksanakan. Akan tetapi jika belum mencapai 100% dan hanya APK yang mencapai 100%, maka APK yang dipakai untuk melihat keberhasilan Program yang sedang dilaksanakan.

5. Kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tak pernah lepas dari kendala. Berbagai macam kendala dihadapi oleh pemerintah dari awal dilaksanakan program ini.

Berdasarkan data hasil wawancara telah diketahui bahwa kendala yang dihadapi Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya adalah:

- a. Keterbatasan dana yang tersedia, karena sebagian besar anggaran disalurkan untuk pembayaran gaji guru.

- b. Sebagian guru masih belum berkualifikasi sarjana (S1)
- c. Banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang datang dari daerah lain yang kemudian tidak sekolah dengan alasan yang beragam.
- d. Luasnya wilayah yang menjadi objek monitoring pengawas dan ada akses jalan yang susah. Sehingga membuat pengawas kesulitan untuk mengawasi kegiatan dengan baik.

Sedangkan kendala yang dihadapi Kementerian agama Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Dana kurang dan dana terlambat sampai ke satuan kerja (satker).
- b. Guru mengajar mata pelajaran yang bukan keahliannya.
- c. Kurangnya kerja sama antara kepala sekolah dengan pengawas.

Menurut hasbullah bahwa:

Persoalan dana merupakan persoalan yang krusial dalam perbaikan dan pembangunan system pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan.⁷⁴

Untuk membantu kelancaran kegiatan yang dilaksanakan, maka diperlukan dana sebagai penunjang. Oleh karena itu dana operasional merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.⁷⁵

⁷⁴ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.25

⁷⁵ Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun2003, pasal 34, ayat 1.

Sedangkan sumber daya manusia menurut Habullah, yakni: “sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan”.⁷⁶ Hal ini merupakan acuan bagi pemerintah untuk mengentaskan masalah anak putus sekolah.

Kendala Dalam hal SDM program wajib belajar pendidikan dasar harus diperhatikan dengan baik. Untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas tentunya pendidiknya harus sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini banyak terdapat kesenjangan seperti ada guru yang hanya lulusan SMA dan mengajar tidak sesuai keahliannya.

Adapun upaya mengatasi kendala yang dilakukan Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Mengusulkan bantuan tambahan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menutupi kekurangan yang terjadi.
- b. Pengadaan kuliah percepatan untuk guru-guru yang masih berpendidikan SLTA/ sederajat, serta memberikan bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang diharuskan.
- c. Pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan untuk anak usia sekolah pendidikan dasar menempuh pendidikan dan belajar melalui paket A, paket B, dan sekolah terbuka.
- d. Melakukan upaya pengawasan/monitoring kelancaran program wajib belajar 9 tahun. Kalau ternyata ditemukan kendala yang dihadapi, segera dicarikan jalan keluar.

⁷⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, hal. 23

Sedangkan upaya yang dilakukan Kementrian Agama mengatasi kendala yang terjadi adalah:

- a. Guru yang mengajar bukan keahliannya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipegangnya tersebut.
- b. Melakukan kerjasama sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah sebagai solusi yang dilakukan berkaitan dengan kurangnya dana.
- c. Pengawas memberi teguran atau nasehat secara tertulis maupun tidak tertulis untuk kepala sekolah agar lebih disiplin. Sedangkan guru yang melalaikan tugasnya ditegur oleh kepala sekolah supaya disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Jika guru tidak menanggapi atau melawan, maka kepala sekolah bisa mengajukan permohonan untuk memindahkan guru yang tidak disiplin tersebut.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar yang terjadi sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu perhatian khusus bagi pemerintah supaya permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah SD/MI di Kelurahan Pahandut sebanyak 4308 siswa. Jumlah ini melebihi jumlah penduduk Kelurahan Pahandut usia 7-12 Tahun yang berjumlah 2603 orang, yang berarti sebanyak 165,50% mengikuti pendidikan SD/MI. Hal ini seperti membuktikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terlaksana dengan baik, walaupun sebenarnya masih ada sekurang-kurangnya 56 orang yang tidak sekolah/ putus sekolah dan juga sejumlah anak dari kelurahan lain yang bersekolah di Kelurahan Pahandut.
2. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah SMP/MTs di Kelurahan Pahandut sebanyak 1053 siswa. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah penduduk Kelurahan Pahandut usia SMP/MTs yang berjumlah 1480 orang, yang berarti hanya 71.14% mengikuti pendidikan. Hal ini seperti adanya penduduk usia SMP/MTs bersekolah di kelurahan lain dan masih terdapat sekurang-kurangnya 26 orang usia 13-15 tahun yang putus sekolah.
3. Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 165,50% dan 145,06%. Jumlah ini

melebihi 100% dan juga melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kelurahan Pahandut.

4. APK dan APM tingkat pendidikan SMP/MTs masih belum mencapai 100% hanya sebesar 71,14% dan 62,97%, jika dibandingkan dengan penduduk usia 13-15 tahun, maka yang mengikuti pendidikan lebih sedikit. Oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk benar-benar menuntaskannya. Jadi, APK dan APM belum sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun di Kelurahan Pahandut.
5. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di kelurahan Pahandut adalah: Masih adanya tenaga pendidik yang berpendidikan SMA/ sederajat dan mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang datang dari daerah lain yang kemudian tidak sekolah dengan alasan yang beragam, kurang baiknya kerja-sama antara kepala sekolah dengan pengawas dalam memonitor pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah: Pengadaan kuliah percepatan dan memberikan bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang diharuskan, memperbaiki kerja sama antara pihak sekolah dengan pegawai, membuka paket A dan B untuk memberi kesempatan kepada anak yang putus sekolah.

B. Saran-saran

1. Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya diharapkan untuk lebih mengoptimalkan upaya penuntasan belajar 9 tahun.
2. Kepada para orang tua supaya lebih mendorong anak, sehingga mereka memiliki kemauan untuk mengikuti pendidikan.
3. Kepada pihak sekolah untuk memotivasi orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pendidikan supaya mereka tetap berkeinginan untuk mengikuti pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Surah Al-Alaq (96) Juz 30*.
- _____Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2,
- _____Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
- _____Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2008.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Qodir, 1999, *Metodologi Riset Kualitatif panduan dasar melakukan penelitian ilmiah*, Palangka Raya: t.np.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- BAPPEDA dan BPS, 2009, *Kota Palangka Raya dalam angka (Palangka Raya city in Figures)*.
- Christine S. T. Kansil, 2003, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa ini*, Jakarta: Djamanat.
- Depdikbud, 1994, *Bunga Rampai Kebijakan teknik pembinaan kewajiban belajar*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar.
- Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farida Yusuf Tayibnapis, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Farida Yusuf Tayibnapis, 1989, *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gredler Margaret E. Bell, 1994, *Belajar dan Membelajarkan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, 2010, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ida Kintamani, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.15 edisi khusus I Januari 2009, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Husin, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.16 no.1 Januari 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- M. Riban Satia, *Detak Kota edisi 31 Mei – Juni 2010*.
- Matthew B. Milles dan A. Miles Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nelly Fathonah, “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada masyarakat di daerah Pesisir Panatai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Skripsi, Stain Palangka Raya, 2009.
- Nurberlian, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.17 no.1 Januari 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Nurul Zuriah, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto dan Suparman, 1997, *Evaluasi Program Diklat*, Jakarta: STAI-LAN.
- S. Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saiful Bahri Djamarah, 2002, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saiful Bahri Djamarah, 2002, *Rahasia Sukses Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Seels dan Richey, 1994, *Teknologi Pembelajaran*, Jakarta: Unit Percetakan UNJ.
- Slameto, 1991, *Proses belajar mengajar dalam sistem kredit semester SKS*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Slameto, 2010, *Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikonto, 1999, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabhet.

Umar Tirtaraharja I Sula, 2002, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Uzer Usman, 2002, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

<http://www.wakhinuddin.wordpress.com/2009/08/07/angka-partisipasi-dalam-pendidikan/> (online 12 maret 2011)

<http://www.ekoguntoro.wordpress.com/2009/04/24/APK-dan -APM/> (online 12 maret 2011)

<http://www.komposiana.com/post/edukasi/2011/02/12/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun/> (online 2 Januari 2012)